

EVALUASI DESA PEMEKARAN

Pirdo Mangatur MS dan M.Y. Tiyas Tinov

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: Evaluation of Village Expansion. This research relate to countryside evaluation of pemekaran in Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu; as a mean to analyse fluency management of governance of utilizable countryside, and also service fluency to society to reach improvement, growth, and progress of development. This research use method research of survey with descriptive quantitative approach, and also obtained data of taken away from sampel is population, namely [done/conducted] research at small and also big population, but data studied by data of taken away from sampel is population, so that found by events relative, relations and distribution between variable. Whereas data collecting technique that is by observation, interview, and enquette. Result of research and solution of data analysis concerning evaluation countryside known that policy of pemekaran of implementation countryside have better by government. This matter seen from responder comments of countryside evaluation pemekaran of mean enter at good category.

Abstrak: Evaluasi Desa Pemekaran. Penelitian ini bertujuan untuk evaluasi desa pemekaran di Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, dengan tujuan untuk menganalisa kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa yang berdaya guna, serta kelancaran pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai peningkatan, perkembangan, dan kemajuan pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian survey dengan pendekatan kuantitatif deskriptif, serta data yang diperoleh dari sampel yang diambil dari populasi, yakni penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi dan hubungan-hubungan antar variabel. Sementara teknik pengumpulan data yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan angket. Hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa kebijakan pemekaran desa telah diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah. Hal ini terlihat dari tanggapan responden dari evaluasi desa pemekaran rata-rata masuk pada kategori baik.

Kata Kunci: Evaluasi, pemekaran desa, pemerintahan desa, dan kemajuan pembangunan.

PENDAHULUAN

Pemekaran desa pada dasarnya merupakan suatu proses pembagian wilayah desa menjadi lebih dari satu wilayah atas dasar prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul dan adat istiadat maupun sosial budaya masyarakat setempat. Tujuan pemekaran adalah meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Adanya pemekaran diharapkan dapat menciptakan kemandirian suatu daerah yang akan dimekarkan.

Dilihat dari posisinya, Kecamatan Rambah Samo merupakan pintu gerbang menuju Ibukota Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini berarti Kecamatan Rambah Samo menurut letaknya sangat strategis, karena berdekatan langsung dengan Kota Pasir Pengaraian (Ibukota Kabupaten). Keadaan tersebut akan berbanding terbalik jika dilihat dari kondisi geografis Kecamatan Rambah Samo yang memiliki wilayah cukup luas dan letak

antar desa yang berjauhan serta jarak tempuh menuju pusat pemerintahan kecamatan yang agak begitu jauh, hal ini menyebabkan pelayanan pemerintahan terhadap masyarakat dalam administrasi kependudukan dan pembangunan menjadi lamban, seperti halnya Desa Sei Salak dan Desa Sei Kuning.

Bertambahnya jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya dan meningkatnya beban tugas di bidang penyelenggaraan pemerintah di wilayah pedesaan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 pada tanggal 24 Juli 2007 tentang Pemekaran Desa di Kabupaten Rokan Hulu. Namun dalam pengamatan pada desa hasil pemekaran yang ada di kecamatan Rambah Samo, ditemukan gejala sebagai berikut: *Pertama*, setelah dimekarkan belum dapat mandiri karena semua pembangunan yang dilakukan hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah dan masih

lemahnya gerakan swadaya dari masyarakat. *Kedua*, belum adanya perubahan setelah pemekaran dalam peningkatan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat desa tersebut. Hal ini terlihat dari kurang handalnya aparat desa di dalam memberikan pelayanan serta rendahnya pengetahuan aparat dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan aparat kurang dapat memanfaatkan waktu, cenderung hanya sebagian waktu yang dipergunakan untuk melayani masyarakat.

Harus ada evaluasi menyeluruh terhadap daerah otonom baru yang telah ada. Apakah setelah adanya daerah otonom baru hasil pemekaran wilayah, menimbulkan hasil yang memuaskan/tidak. Apakah kinerja meningkat atau tidak. Apakah dengan adanya pemekaran malah menimbulkan konflik horizontal atau malah menjadikan daerah semakin makmur dan sejahtera. Evaluasi dilaksanakan karena memang tidak seluruh program kebijakan publik membuahkan hasil yang diinginkan. Terkadang kebijakan yang dibuat gagal mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai manfaat atau sasaran suatu kebijakan.

Pada dasarnya kebijakan publik dijalankan dengan maksud tertentu, untuk meraih tujuan-tujuan tertentu yang berasal dari dari permasalahan yang telah ditetapkan sebelumnya. Bila kebijakan dipandang sebagai suatu pola kegiatan yang berurutan, maka evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan. Namun demikian, ada beberapa ahli yang mengatakan sebaliknya bahwa evaluasi bukan merupakan tahap akhir dari proses kebijakan publik

Mustopadidjaja (2003) mengatakan bahwa evaluasi merupakan kegiatan pemberian nilai atas suatu fenomena, yang di dalamnya terkandung pertimbangan nilai (*value judgement*) tertentu. Fenomena yang dinilai adalah berbagai fenomena mengenai kebijakan, seperti tujuan dan sasaran kebijakan, kelompok sasaran yang ingin dipengaruhi, instrumen kebijakan yang dipergunakan, respons dari lingkungan kebijakan, kinerja yang dicapai, dampak yang terjadi dan lain-lain. Sedangkan evaluasi kinerja kebijakan merupakan bagian dari evaluasi kebijakan yang secara

spesifik terfokus pada berbagai indikator kinerja yang terkait kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan.

Selanjutnya menurut Widodo (2008) untuk melakukan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan terdapat beberapa tahap yang harus dilakukan : *Pertama*, mengidentifikasi apa yang menjadi tujuan kebijakan, program dan kegiatan. *Kedua*, penjabaran tujuan kebijakan, program dan kegiatan ke dalam kriteria atau indikator pencapaian tujuan. *Ketiga*, pengukuran indikator pencapaian tujuan kebijakan program. *Keempat*, berdasarkan indikator pencapaian tujuan kebijakan program tadi, data dicari di lapangan. *Kelima*, hasil data yang diperoleh dari lapangan diolah dan dikomparasi dengan kriteria pencapaian tujuan. Sementara itu, Dunn (1999) menyatakan bahwa kriteria-kriteria evaluasi kebijakan publik, yakni efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan.

Penelitian ini bertujuan untuk evaluasi desa pemekaran di Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, dengan tujuan untuk menganalisa kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa yang berdaya guna, serta kelancaran pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai peningkatan, perkembangan, dan kemajuan pembangunan.

METODE

Jenis penelitian adalah kuantitatif deskriptif, dimana data yang dikumpulkan lalu disajikan dalam bentuk angka-angka yang disusun dalam tabel dan hasilnya digambarkan dalam uraian kalimat-kalimat secara rinci. Penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, mean (pengukuran tendensi sentral), perhitungan desil, presentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi. Data yang dikumpulkan lalu dijabarkan dalam bentuk uraian secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi kebijakan pemekaran desa merupakan suatu penilaian terhadap keberhasilan pelak-

sanaan pemekaran desa, dalam artian apakah pemekaran desa telah berjalan sesuai dengan tujuan yaitu dalam hal pembangunan maupun pelayanan desa. Maka penilaian kebijakan pemekaran desa, yakni Desa Sei Salak dan Desa Sei Kuning, menekankan terhadap beberapa indikator penilaian seperti efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan. Setelah itu, efisiensi yang berkaitan langsung dengan usaha pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang berkaitan. Kemudian kecukupan dalam menjawab permasalahan masyarakat dan kepentingan masyarakat, perataan dari distribusi manfaat pembangunan, respon terhadap keluhan masyarakat dan mampu memberikan apa yang dibutuhkan masyarakat pada saat ini dan ketepatan dalam manfaat kebijakan terhadap masyarakat desa.

Berdasarkan data yang telah diuraikan, maka dapat diketahui bahwa evaluasi atau penilaian itu termasuk dalam kategori baik dengan persentase mencapai 52,3 %. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemekaran desa telah diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah dan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat cukup baik. Ini dapat dilihat dari semua indikator termasuk dalam kategori baik.

Ditinjau dari indikator efektifitas yang mana efektifitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan. Jadi apabila tujuan tersebut telah dicapai, baru dapat dikatakan efektif. Adapun tujuan pemekaran itu mengenai beberapa hal, antara lain: pemerataan pembangunan, pelayanan kepada masyarakat. Maka dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa efektifitas kebijakan termasuk dalam kategori baik dengan persentase mencapai 68,3. Berdasarkan data ini menunjukkan bahwa pembangunan desa cukup merata meskipun masih ada sebagian yang kurang merata seperti halnya ada sebuah dusun yang letaknya agak jauh dari pusat desa.

Selanjutnya dari indikator efisiensi, yang mana efisiensi yaitu mengandung arti pelayanan

hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang berkaitan. Efisiensi dapat dilihat dari bagaimana usaha mencapai pembangunan yang merata dan bagaimana usaha yang dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Dari hasil penelitian terhadap efisiensi termasuk dalam kategori baik dengan persentase 37,0 %. Hal ini menunjukkan usaha-usaha dalam mencapai tujuan kebijakan dirasakan telah optimal bagi masyarakat. Ini disebabkan pemerintah desa telah maksimal dalam mengusulkan pembangunan yang sudah direncanakan di desa. Setelah itu dilihat dari usaha untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, ini disebabkan telah adanya pemekaran desa sehingga menjadi sangat terjangkau dengan pelayanan yang diberikan sepenuhnya dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Desa.

Berikutnya dilihat dari aspek kecukupan, dalam pengertiannya kecukupan merupakan suatu rumusan kebijakan untuk menjawab permasalahan masyarakat dan kepentingan masyarakat. Disini menyangkut masalah pelayanan dalam segala keperluan yang berhubungan dengan urusan pemerintah, dengan adanya pemekaran dapat menyelesaikan masalah. Dalam indikator kecukupan dalam pelayanan dapat dilihat dari bagaimana keadilan pembangunan yang dilaksanakan dan bagaimana pemberian pelayanan yang dilakukan. Setelah melakukan penelitian dapat diketahui bahwa penilaian terhadap kecukupan dalam menyelesaikan masalah masuk dalam kategori baik dengan rata-rata 55 atau dengan persentase mencapai 52,9 %.

Hal ini berarti masalah pembangunan dirasakan telah merata oleh masyarakat, namun tidak semua masyarakat dapat merasakan dampak dari pembangunan tersebut. Ini terlihat dari jumlah responden yang menyatakan keadilan pembangunan kurang merata sebanyak 42 orang, sementara untuk kategori baik ada sejumlah 49 orang. Itu menandakan terjadi selisih yang tidak begitu besar antara kategori baik dan tidak baik. Dilihat dari pemberian pelayanan,

penilaian masyarakat telah sesuai dengan harapan semua lapisan masyarakat desa. Tapi dari hasil wawancara langsung dengan beberapa responden, ada yang menyatakan pelayanan hanya dilakukan pada pusat desa saja.

Dilihat dari aspek pemerataan, yang mana pemerataan merupakan pembangunan yang dilaksanakan dapat semakin merata dan masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan. Sampai sejauhmana biaya manfaat yang dapat dirasakan semua lapisan masyarakat dapat dilihat dari bagaimana manfaat hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat dan bagaimana pemerataan pelayanan yang diberikan terhadap masyarakat. Dari data yang ada mengenai penilaian terhadap pemerataan dapat diketahui bahwa aspek ini masuk dalam kategori baik dengan persentase 44,2 %. Hal ini disebabkan masyarakat merasakan distribusi manfaat kebijakan dari hasil pembangunan telah memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat desa dan pelayanan yang diberikan dalam kelancaran urusan administrasi di kantor desa juga memberikan manfaat yang positif bagi warga masyarakat.

Responsivitas adalah tanggap terhadap keluhan masyarakat dan mampu memberikan apa yang dibutuhkan masyarakat pada saat ini. Berdasarkan data mengenai penilaian masuk dalam kategori baik dengan persentase sebesar 38,8 %. Hal ini menunjukkan bahwa responsivitas cukup baik dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat serta menanggapi daya tanggap Pemerintah Desa dalam hal melaksanakan kebijakan pemekaran desa dan juga cukup baik untuk merespon keluhan serta menanggapi aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dalam rangka pembangunan desa.

Ketepatan suatu hasil yang diinginkan dapat ditemukan dan dikembangkan sehingga benar-benar berguna dalam memberikan pemecahan persoalan. Ditegaskan bahwa penilaian ketepatan disini yaitu menekankan pencapaian tujuan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat untuk warga masyarakat. Dari data mengenai penilaian ketepatan dapat diketahui masuk dalam kategori baik dengan persentase mencapai 58,2 %. Ini menunjukkan bahwa pembangunan desa

yang dilaksanakan telah memberikan manfaat yang begitu besar dirasakan oleh masyarakat desa, selanjutnya pelayanan surat menyurat kependudukan dapat memberikan kemudahan, tepat serta jika menimbulkan biaya masih memungkinkan terjangkau oleh warga masyarakat desa setempat.

SIMPULAN

Evaluasi terhadap pemekaran Desa Sei Salak dan Desa Sei Kuning dengan hasil penilaian secara umum masuk dalam kategori baik. Dari enam indikator, dua diantaranya menyatakan bahwa pemekaran desa cukup sesuai dengan ketentuan dalam pemerataan dan responsivitas terutama pemerataan pelayanan yang diberikan terhadap masyarakat. Pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan kepada masyarakat cukup mengalami perubahan. Pembangunan infrastruktur seperti semenisasi yang dilaksanakan pemerintah desa masih kurang merata. Pemerintah desa telah dikatakan cukup baik dalam merespon aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Pemekaran desa yang dilaksanakan belum memberikan manfaat langsung bagi warga masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal. 2002. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Curah.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Dunn, William N., 1999. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.
- Mustopadidjaya. 2005. *Manajemen Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara-Duta Pertiwi Foundation.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. 2005. *Metodologi Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfa Beta.
- Yusuf, Farida. 2008. *Evaluasi Program dan Instrumen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.